

REKAPITULASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERBANKAN

Supriyo Hartadi W.

Universitas Gunadarma
Jalan Margonda Raya No.100 Depok

ABSTRAKSI

Setelah Bank Indonesia mengamati krisis perbankan di beberapa negara, kemudian menyusun langkah-langkah restrukturisasi penyuntikan modal ke perbankan hal ini kemudian menjadi isu sentral. Tetapi tidak semua bank diberi tambahan modal, masalahnya bank yang berjumlah sekitar 215 saat ini masih harus dikurangi jumlahnya.

Pemilihan bank mana yang akan diberi tambahan modal oleh Bank Indonesia dilakukan menggunakan *Due diligence* terhadap kondisi perbankan. *Due diligence* dilakukan dalam waktu empat bulan, tapi dalam waktu empat bulan tersebut indikator kinerja perbankan terus berubah merosot. Salah satu indikator utama yang akan ditinjau dari hasil *due diligence* itu adalah CAR (*Capital Adequasi Rasio*), dari semua bank itu dikelompokkan menjadi tiga kategori.

Adapun penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aset (*aktiva*), aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, aspek likuiditas dan aspek solvabilitas.

Kata Kunci : modal, bank sehat, bank tidak sehat

PENDAHULUAN

Studi kasus untuk penyelesaian perbankan telah berlangsung sejak April 1998. Gambaran menyeluruh yang dialami perbankan nasional sekarang adalah naiknya selisih utang dan piutang dalam bentuk valuta asing, yang seharusnya maksimal 25% dari modal. Kredit bermasalah pun naik sampai 49% untuk bank-bank pemerintah dan 63% un-

tuk bank-bank swasta. *Capital Adequasi Rasio* (CAR) turun karena modal sudah meluas dan bahkan minus serta indikator perbankan lainnya juga sangat buruk.

Setelah Bank Indonesia mengamati krisis perbankan di beberapa negara, mereka menyusun langkah-langkah restrukturisasi penyuntikan modal ke perbankan dan ini kemudian menjadi isu sentral.

Tetapi tidak semua bank diberi tambahan modal, masalahnya bank yang berjumlah sekitar 215 sekarang ini masih harus dicitkan.

Pemilihan bank yang akan diberi tambahan modal oleh Bank Indonesia dilakukan menggunakan *Due diligence* terhadap kondisi perbankan. *Due diligence* dilakukan dalam waktu empat bulan, tapi dalam waktu empat bulan

tersebut indikator kinerja perbankan terus berubah merosot. Salah satu indikator utama yang akan ditinjau dari hasil *due diligence* itu adalah bahwa CAR dari semua bank itu dikelompokkan menjadi tiga kategori :

- Kategori A, adalah bank yang memiliki CAR di atas 4%. Bank yang masuk kategori ini tidak dimasukkan dalam program rekapitulasi, walaupun bank *International Settlement* mengharuskan perbankan dunia harus memiliki CAR minimal 8%.
- Kategori B, adalah bank yang memiliki CAR antara 4% hingga minus 25%. Kelompok ini akan dimasukkan ke dalam program rekapitulasi.
- Kategori C, adalah bank yang memiliki CAR di bawah minimal 25%. Kelompok ini dimaksud program likuidasi/bergabung.

Dari pengelompokan tersebut di atas maka tingkat resiko terkena likuidasi yang paling tinggi adalah perbankan yang berada di kelompok C, yaitu yang memiliki CAR di bawah atau minus 25%. Untuk bisa

menghindar resiko terkena likuidasi maka perbankan tersebut diharuskan melakukan penggabungan atau mencari investor baru dengan tujuan dapat menaikkan CAR sampai minimal 4%. Jika perbankan tersebut tidak bias bergabung atau mencari investor baru, maka likuidasi adalah jalan terakhir yang harus dilakukan dan itu merupakan suatu resiko yang harus dihadapi oleh dunia perbankan yang memiliki CAR minus hingga 25%.

Di samping tahapan rekapitulasi, pemerintah melalui Bank Indonesia juga menjalankan dan mendirikan sejumlah lembaga pendukung restrukturisasi, dan juga merubah UU No. 7/1992 tentang perbankan, karena lemahnya peraturan yang menjadi latar belakang kehancuran perbankan.

Masih ada langkah yang dilakukan untuk merestrukturisasi perbankan di samping rekapitulasi, misalnya bank kategori A tidak diharuskan untuk ikut rekapitulasi tetapi bank tersebut diharuskan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Bank tersebut harus

dibersihkan dari aset yang bermasalah sehingga bank bisa berkonsentrasi pada bisnisnya.

Mayoritas bank nasional berada pada kelompok C. Bank kelompok C harus bergabung atau merangkul investor baru dalam rangka untuk menambah modal dan meminimalkan resiko supaya tidak terkena likuidasi.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menyajikan suatu ulasan secara ringkas mengenai analisis resiko yang mungkin terjadi terhadap perbankan yang tidak dapat menaikkan tingkat CAR sampai minimal 4% dan bagaimana implikasinya serta bagaimana solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk mengurangi resiko tersebut dari berbagai aspek dalam mengatasi masalah tersebut.

PEMBAHASAN

Permasalahan

Sektor perbankan nasional saat ini sedang mengalami berbagai masalah seiring dengan adanya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 dan

serta pertengahan tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merosot tajam, hal ini tidak terlepas dari likuidasi pada Tanggal 16 November 1997. Krisis terus berlanjut meski pemerintah sudah mengeluarkan program penjaminan dana nasabah pada bulan Januari 1998.

Nasib sektor perbankan diperburuk oleh situasi politik yang terus bergejolak, beberapa bank yang dianggap berbau kolusi, korupsi dan nepotisme mendapat hambatan cukup serius. Saat ini pemerintah mulai mengambil tindakan tegas dalam mengatasi sektor perbankan dan bagi perbankan yang tidak bisa membenahi manajemen dan struktur permodalannya akan terkena resiko beku operasi atau pengambilalihan.

Memburuknya permodalan bank tidak dapat dilepaskan dari adanya praktek perbankan yang menyimpang atau melanggar ketentuan kesehatan bank. Pada sebagian besar bank, bentuk penyimpangan atau sikap *non compliance* terhadap ketentuan kehati-hatian terjadi dalam berbagai bentuk,

diantaranya adalah pelanggaran dalam ketentuan "Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)", dan proses pemberian kredit yang sehat sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB), pelanggaran atas ketentuan BI mengenai larangan pemberian kredit untuk kegiatan tertentu, dan pelanggaran berupa pemberian jaminan surat-surat berharga yang juga telah dilarang berdasarkan ketentuan BI.

Saat ini perbankan nasional tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian. Tanpa pembenahan perbankan, kegiatan ekonomi akan terlambat, dan pada gilirannya akan memperburuk kondisi perbankan itu sendiri, karena kegiatan ekonomi yang seret akan meningkatkan kredit macet.

Program restrukturisasi mempunyai dua pilihan kebijakan, khususnya mengenai penyehatan permodalan bank. Pilihan pertama tidak dilakukan rekapitulasi, sehingga bank yang modalnya tidak cukup harus ditutup. Pilihan kedua, dila-

kukan rekapitulasi pada bank yang memenuhi syarat untuk itu, sehingga kapasitas pelayanan jasa perbankan dapat dipelihara. Konsekuensi kebijakan ini adalah untuk rekapitulasi pemerintah perlu menyediakan dana untuk rekapitalisasi.

Untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai kondisi masing-masing bank maka dilakukan *due diligence* terhadap seluruh bank nasional, baik bank BUMN, bank BPD, maupun bank swasta. Kesehatan sistem perbankan sangat tergantung pada kesehatan dari bank yang berada dalam sistem perbankan tersebut. Aspek penting yang mencekam kesehatan bank adalah tingkat kecukupan modal (CAR). Bank yang CAR-nya rendah tidak memperoleh kepercayaan dari bank lainnya, dengan konsekuensi bank tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sumber pembiayaan ekonomi maupun sebagai sarana dalam sistem pembayaran nasional.

Pemecahan Masalah

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan dan permasalahan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perbankan dalam menjalankan operasionalnya harus mempunyai rasio kecukupan modal yang cukup, sehingga dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini masih bisa bertahan dan dapat terhindar dari rekapitalisasi dan bahkan terkena resiko pembekuan operasi.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dibubarkan kegiatan operasinya.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang keseha-

tannya terus meningkatkan tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi bank yang kurang sehat harus mendapat pengarahannya atau sanksi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, bergabung, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidasi keberadaannya jika memang kondisi bank tersebut sudah parah.

Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek seperti :

1. Aspek Permodalan

Dalam aspek ini yang dinilai adalah struktur permodalan yang ada di bank tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Modal yang dipergunakan bisa modal sendiri atau modal asing. Perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian juga didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

2. Aspek Kualitas Aset (Aktiva)

Penilaian terhadap aspek kualitas aset dilakukan dengan menilai jenis aset yang dimiliki apakah yang bersifat dana likuid, likuid atau kurang likuid. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara aktiva yang diklarifikasikan dengan aktiva produktif dan dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

3. Aspek Kualitas Manajemen

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas manajemen juga dilihat dari pendidikan serta pengalaman para karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

4. Aspek Rentabilitas

Aspek ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Perlu diperiksa apakah setiap periode atau ta-

hun meningkat dengan baik atau tetap atau sebaliknya turun. Bank yang sehat adalah bank yang rentabilitasnya terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan ROA dan BOPO (perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi).

5. Aspek Likuiditas

Merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Secara umum rasio likuiditas ini yang sehat adalah 2 : 1 atau dengan kata lain setiap satu utang lancar akan ditutupi dengan 2 harta lancar. Rasio ini mempertimbangkan antara posisi aktiva lancar dengan posisi pasiva lancar yang ada dalam neraca suatu bank. Semakin besar aktiva lancarnya, maka semakin likuid bank tersebut demikian pula sebaliknya. Akan tetapi jika perbandingannya selalu besar misalnya aktiva lancar 5 : 1 dengan utang lancarnya maka ini berarti bank tersebut banyak dana yang menganggur atau tidak dimanfaatkan

dan tentu saja mempengaruhi kesehatan bank yang bersangkutan.

6. Aspek Solvabilitas

Aspek ini akan menilai apakah bank tersebut mampu untuk membayar segala utang-utangnya pada saat dilikuidasi. Apabila bank tersebut mampu maka hal ini merupakan penilaian tersendiri terhadap kesehatan bank tersebut.

Untuk melengkapi keenam aspek tersebut di atas, juga dilakukan penilaian akan pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan posisi devisa netto.

Tujuan utama didirikannya perubahan (dalam hal ini perbankan) adalah agar dapat menjalankan operasionalnya secara terus-menerus. Untuk mencapai tujuan agar tetap bertahan memang tidak mudah, ini disebabkan oleh banyaknya kejadian masa mendatang yang sulit diprediksi, seperti yang sedang dialami saat ini yaitu adanya krisis ekonomi yang hampir semua ba-

dan usaha tidak bisa memprediksinya.

Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan mengancam kegiatan operasionalnya, banyak cara yang dapat dilakukan agar tetap dapat bertahan dan berkembang terus. Salah satunya adalah dengan bergabung atau mencari investor baru, hal ini akan lebih baik daripada dibubarkan begitu saja.

Penyehatan bank tidak cukup dengan sekedar melakukan penyuntikan modal, tetapi sistem yang melatarbelakangi kehidupan perbankan juga harus dirombak total.

Terdapat enam faktor yang menjadi penyebab terjadi krisis perbankan, yaitu :

1. Penerapan kebijakan ekonomi yang kinerjanya tidak akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yg stabil dan berlanjut. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang berpihak seperti pemberian lisensi pada perusahaan yang tidak profesional, tetapi karena kepentingan tertentu, contoh pengembangan mobil Timor.

2. Gejolak besar mata uang. Gejolak besar mata uang terjadi karena aktivitas impor yang lebih besar dari pada ekspor; kegagalan pemerintah melahirkan industri tangguh dan berdaya saing di pasar internasional, termasuk penyebabnya, misal industri pesawat terbang nusantara IPTN.
3. Lemahnya peraturan dan pengawasan di sektor keuangan, dengan kata lain kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi manajemen perbankan justru berubah menjadi liar. Hal itu diperburuk oleh ketidakmampuan Bank Sentral mengawasi perbankan dan sebaliknya malah Bank Sentral didikte oleh perbankan.
4. Persoalan pada struktur ekonomi makro, yaitu terjadi ketimpangan pendapatan, sektor industri dikuasai oligopolis yang haus keuntungan tapi tidak efisien. Secara empiris kondisi perekonomian seperti malah Bank Sentral didikte oleh perbankan.
5. Kelanjutan eksternal. Sangat mudah menggoyang

sendi-sendi perekonomian karena melahirkan pengaruh *contangin* jika dianggap sama.

6. Munculnya ketidakstabilan politik.

Implikasi dari keenam faktor tersebut di atas adalah krisis keunggulan persoalan pada industri perbankan, meski masing-masing memberikan porsi yang berbeda. Fakta yang ditemukan antara lain modal bank menjadi negatif dan kredit macet.

Dalam kondisi seperti tersebut maka perbankan yang diajukan Bank Indonesia merupakan usulan yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dari proses penetapan kebutuhan dana/ modal dalam program rekapitalisasi dan keterbukaan melakukan penerapan langkah-langkah yang akan diambil atas bank bersangkutan.

Program rekapitulasi dengan jelas menunjukkan keputusan yang harus diambil oleh pengurus bank, khususnya pemilik/pemegang saham, apakah kesinambungan usaha yang dijalankan selama ini akan diteruskan atau dibubar-

kan. Program rekapitalisasi menghendaki penyehatan perbankan dalam bentuk yang tidak bisa di tawar-tawar lagi, khususnya untuk pemenuhan modal.

Pemenuhan kebutuhan modal guna menanggung beban aktiva produktif adalah satu-satunya alternatif pada saat ini; sedangkan kesinambungan kesehatan selain kebutuhan modal juga harus disertai dengan faktor internal bank itu sendiri.

Hal pertama yang harus diperhatikan, dengan mengu- atnya nilai rupiah belakangan ini akan mempengaruhi posisi rugi-laba atas bank devisa yang mempunyai uang dolar.

Hal kedua, bank yang telah menjual sahamnya ke masyarakat (bank publik) secara hukum memiliki perbedaan, misalnya perusahaan berbentuk Tbk tidak mengenal preferensi sedangkan perusahaan tertutup mengenal preferensi.

Hal ketiga, kelangsungan usaha bank-bank juga tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu :

- Kebijakan suku bunga tinggi yang menyebabkan timbulnya penyebaran negatif.
- Kebijakan suku bunga tinggi, menyebabkan banyak debitur yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, sehingga bank memerlukan cadangan yang cukup besar.
- Bantuan modal sejumlah 80% dari kebutuhan modal bagi bank yang kategori Bank Indonesia, akan digunakan untuk pembelian obligasi pemerintah. Marjin atas obligasi yang akan sangat mempengaruhi kesinambungan usaha bank.

Program rekapitalisasi perbankan bertujuan untuk mempertahankan keberadaan bank yang mempunyai prospek untuk terus berkembang dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sasaran program untuk semua bank baik di dalam maupun di luar BPPN. Langkah-langkah program rekapitalisasi tersebut adalah :

- a) Menghitung kebutuhan dana rekapitalisasi dengan melakukan *due diligence*.

- b) Melakukan pengelompokan atas seluruh bank berdasarkan hasil *due diligence* sebagai berikut:

- Kategori A : bank dengan CAR di atas 4%
- Kategori B : bank dengan CAR lebih kecil dari 4% hingga minus 25%
- Kategori C : bank dengan CAR di bawah minus 4%

- c) Mengikutsertakan bank-bank dalam kategori Bank Indonesia ke dalam program rekapitalisasi dengan ketentuan pemilik dan manajemen bank yang bersangkutan mempunyai integritas dan kompetisi yang layak.

- d) Meminta bank yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi membuat rencana bisnis dalam waktu satu bulan.

- e) Meminta bank dengan CAR di bawah minus 25% supaya dapat ikut program rekapitalisasi maka harus melakukan beberapa hal dalam waktu satu bulan sebagai berikut :

- Melakukan setoran modal.
- Memperbaiki kualitas aktiva yang tidak produktif.

Melihat demikian pelik dan banyaknya masalah yang harus dilakukan sebelum bank ikut dalam program rekapitalisasi, maka banyak pemilik bank saat ini melakukan negosiasi dengan pihak-pihak berkepentingan agar persyaratan yang harus dipenuhi tidak terlalu memberatkan.

PENUTUP

- a) Kondisi perbankan nasional semakin parah dan membawa sebagian besar bank nasional masuk ke dalam kelompok C sesuai dengan kategori Bank Indonesia, dengan posisi modal sangat kurang baik. Ini berarti kewajiban para pemegang saham untuk memasok dana akan semakin besar.
- b) Kondisi *Non Performing Limit* (NPL) yang semakin membengkak sulit di atasi dengan cara hanya merestrukturisasi, sepan-

jang kondisi ekonomi makro belum pulih dan mampu memberi perangsang untuk pemberdayaan kembali dunia usaha.

- c) Konsep rekapitalisasi tanpa adanya aliran kas masuk yang memadai, menyebabkan penyehatan perbankan hanya bersifat administratif dan bank bertahan sepanjang modal masih tersedia.
- d) Partisipasi modal/ekuitas pemerintah dalam bentuk obligasi semestinya merupakan perangkat/instrumen yang mampu menciptakan perputaran dana sehingga dapat menjadi basis modal kerja dan bukan sebagai perangkat yang mati atau tidak dapat diperjualbelikan karena tidak menarik bagi investor.
- e) Kebijakan pembenahan perbankan antara lain dengan rekapitalisasi hendaknya dikaji secara

mendalam, sebab masalah dan resiko yang dihadapi sangat kompleks dan tidak sekedar dapat dilakukan dengan langkah-langkah kebijakan parsial, tetapi memerlukan uluran tangan pemerintah lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Djinarto. **Banking Asset Liability Management. Perencanaan Strategi, Pengawasan dan Pengelolaan Dana.** Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
- Francis. Jank Clark. **Investments : Analysis and Management.** Fifth Edition. Mc Draw Hill, Inc. New York. 1991.
- Gitman Laurence J., and Joehanh L. Michael D. **Fundamentals of Investing.** Fourth Edition. Harper Collins Publisher. New York. 1990.

John S., Mauriel and Robert N., Anthony. **Misevaluati-on of Investment Center Performance.** Harvard Business Review. Maret-April 1996.

Majalah Pengembangan Perbankan. Terbitan LPPI. Berbagai nomor. Jakarta. 1985-1990. Muchdarsyah Sinungian. **Manajemen Dana Bank.** Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 1993.

William H. Baughn, Thomas I., Storris and Charles E. Walker. **The Bankers Hand Book.** Third Edition. Toppan Company Ltd. Tokyo. Japan. 1994.